

## PERS RILIS

### Pemprov Riau Tak Wajar Peroleh WTP

#### Catatan FITRA Riau Terkait Opini BPK RI Atas LKPD Provinsi Riau tahun 2012

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Jumat (5/7) menyampaikan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun 2012. Hasil audit keuangan tersebut BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Pragraf Penjelasan (WTP – DPP).

Atas Opini BPK RI tersebut, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau menilai bahwa BPK RI tidak serius/ngawur dalam melakukan audit keuangan daerah. Sehingga mengeluarkan opini hasil audit yang tidak sewajarnya.

Dengan berbagai persoalan keuangan daerah khususnya provinsi Riau seharusnya Pemprov Riau tidak wajar memperoleh opini WTP. Jika system audit yang tidak objektif dilakukan maka sama halnya BPK RI, melanggengkan korupsi di negeri ini.

Terdapat 6 alasan FITRA Riau menilai ketidak wajarannya pemberian opini WTP kepada LKPD provinsi Riau tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Audit BPK hanya dilakukan pada syarat administrasi keuangan, yaitu hanya ketepatan laporan keuangan yang dilengkapi dengan pertanggung jawabannya. Dengan demikian BPK lemah dalam audit soal efisiensi dan efektifitas anggaran yang di gunakan oleh daerah sebagaimana di atur dalam pasal 3 UU 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
2. Menganalisis dalam laporan BPK RI atas LKPD tahun 2012, bahwa terdapat kesalahan – kesalahan yang seharusnya berakibat fatal pada pengelolaan keuangan daerah. Seperti dalam Sistem pengendalian interen, bahwa BPK menemukan kesalahan – kesalahan seperti :
  - Realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial dan belanja modal menyalahi ketentuan penganggaran.
  - Tata cara transfer bagi hasil pendapatann ke kabupaten/kota tidak jelas.
  - Asset tetap peralatan dan mesin tidak diyakini kewajarannya.Selanjutnya pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan BPK juga menemukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Seperti :
  - Pengelolaan kas daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan,
  - Penyertaan modal tidak berdasarkan peraturan daerah penyertaan modal
  - Penyertaan m

Dengan temuan – temuan tersebut, jelas merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau dalam pengelolaan keuangan dan berakibat kerugian Negara yang besar pula. dan sangat jelas bahwa dasar temuan BPK tersebut tidak layak laporan keuangan provinsi Riau diberikan opini WTP DPP.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau

*Indonesia Forum For Budget Transparency of Riau*

Jl. Kartama Perumahan Rindu Serumpun1 Blok E5 Rt 005/Rw007 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru E-mail: [fitrariou@yahoo.com](mailto:fitrariou@yahoo.com) Web: [www.fitrariou.org](http://www.fitrariou.org) Hp: 085271614521

3. Terkait dengan kinerja keuangan, tahun 2012 merupakan puncak besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari tahun - tahun sebelumnya. Tahun 2012 SilPa APBD sebesar Rp. 1.972.417.992.922,49,- atau sebesar 23,6 % dari total belanja daerah. Besarnya SILPA ditahun 2012 meskipun dipengaruhi dari realisasi pendapatan yang melebihi target anggaran perubahan (APBD-P) namun lebih dibesar dipengaruhi dari kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran dalam melaksanakan program – program baik fisik maupun keuangan. Misalnya :
  - Anggaran Bantuan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang seharusnya dianggarkan Rp. 295,1 Milyar lebih, hanya terealisasi 60,40 % yaitu sebesar Rp. 178,2 Milyar.
  - Belanja bagi hasil kepada kabupaten kota dan pemerintah desa yang seharusnya dianggarkan Rp. 1,02 Triliun, hanya tersalurkan 77,79% yaitu sebesar Rp. 796,7 Milyar.
  - Dan lain –lain.Contoh tersebut menggambarkan bahwa, tidak terelalisasinya anggaran maka rencana pembangunan di kabupaten Kota dengan menggunakan anggaran Provinsi Riau jelas terhambat.  
Selain dari itu, besaran SILPA juga dipengaruhi oleh pagu anggaran yang sangat besar melebihi angka sebenarnya, seperti pada pengadaan barang dan belanja modal sehingga berakibat sisa keuangan yang dilaporkan besar, apa lagi yang tidak dilaporkan.
4. **Potensi Mark Up Tinggi**, BPK RI tidak melihat sejauhmana pagu anggaran yang disusun setiap SKPD mendekati angka sebenarnya. Dalam laporan keuangan realisasi anggaran untuk belanja modal dan belanja barang, terdapat sisa uangan dibawah 75%. Dengan demikian menunjukkan pagu anggaran yang disusun cenderung berpotensi pengupuan, dan mengakibatkan SILPA yang tinggi setiap tahunnya.
5. **Penggunaan Dana Hibah dan Sosial**, tahun 2012 provinsi Riau mengalokasi anggaran Hibah sebesar Rp. 1,8 Triliun, dan terealisasi sebesar Rp. 1,454 Triliun. Alokasi tersebut diperuntukan untuk BOS Sekolah dan Anggaran PON mencapai Rp. 500 Milyar. Namun ratusan Milyan lagi yang dialokasi ke lembaga –lembaga sesuai bidang (Ormas, yayasan, LSM dll). Besarnya anggaran yang dialokasikan tersebut BPK hanya memeriksa pertanggung jawaban secara administrasinya (ada laporan, kwitansi, dll). Namun terkait kejelasan penggunaan anggaran yang bersifat non adminsitrasasi BPK tidak melakukan audit. Dalam dokumen APBD tahun 2012 pada lampiran II tentang penerima Hibah, FITRA Menemukan sebagai berikut :
  - Ratusan Lembaga penerima Hibah dna bantuan Sosial tidak dicantumkan secara jelas dalam lampiran APBD, hal itu jelas melanggar ketentuan perundangan tentang hibah yang berasal dari bantuan sosial.
  - Ratusan penerima hibah menerima alokasi anggaran tidak masuk akal.
  - Dengan tidak dicantumkan secara jelas nama dan alamat serta kegiatan yang diusulkan, maka sangat besar potensi anggaran tersebut menguap oleh organisasi-organisasi “fiktif).

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Provinsi Riau

*Indonesia Forum For Budget Transparency of Riau*

Jl. Kartama Perumahan Rindu Serumpun1 Blok E5 Rt 005/Rw007 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan

Damai Pekanbaru E-mail: [fitrariau@yahoo.com](mailto:fitrariau@yahoo.com) Web: [www.fitrariau.org](http://www.fitrariau.org) Hp: 085271614521

Dalam laporan BPK RI menunjukkan kesalahan hibah dan bantuan sosial hanya pada system pengendalian interen, dengan demikian audit BPK diragukan untuk soal anggaran hibah dan bantuan sosial. Karena tidak dilakukan uji pada lembaga – lembaga penerimanya.

- 6. Tahun 2012,** merupakan tahun pembobolan anggaran, dengan tertangkapnya 10 anggota DPRD, sampai Gubernur Riau, itu akibat dari system keuangan yang tidak dilakukan dengan baik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa anggaran provinsi Riau tahun 2012 sangat berpotensi terjadi pembobolan anggaran melalui mark-up. Fungsi budgeting di tingkat legislative tidak terlepas dengan praktek korupsi dan bagi-bagi jatah anggaran. Eksekutif dalam merancang APBD juga tidak terlepas dari potensi mark-up atas nilai – nilai anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

**Demikian, 6** alasan FITRA Riau melihat ketidak wjarian BPK RI memberikan opini WTP yang tidak berdasarkan audit secara objektif. Oleh karena itu BPK RI lembaga audit daerah seyognya melakukan audit secara objektif dan menyampaikan kepada publik hasil audit yang telah dilakukan.

**Pekanbaru, 07 Juli 2013**  
**Koordinator FITRA RIAU**

**ttd**

**USMAN**